



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Khusus - Calon PN)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANAK AGUNG PUTU SUGESTINI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
3. NHK : 833726

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/87 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 22.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 172.500.000

**III. HUTANG** Rp. 145.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 27.500.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **FAJAR APRIANI**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **832801**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	10.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	8.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	40.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	343.000.000
<b>Sub Total</b>	Rp.	401.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	273.603.337
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	127.396.663

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI

**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GUSTI NGURAH KAMA WIJAYA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 717333

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. ----

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 353.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 23.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 174.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 550.000.000

**III. HUTANG** Rp. 34.700.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 515.300.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI****UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GUSTI NGURAH KAMA WIJAYA**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **717333**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	391.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
90.000.000		
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
290.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	
11.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	15.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	126.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	532.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	532.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I GUSTI NGURAH CRISNA ADIJAYA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 831473

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	25.000.000
1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	25.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	587.709
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	25.587.709
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	287.889.588
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-262.301.879

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I KETUT SUDARMA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 488545

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 227.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMEX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.477.000.000

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.477.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I KETUT SUDARMA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 488545

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 223.500.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMEX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.473.500.000

**III. HUTANG** Rp. ---

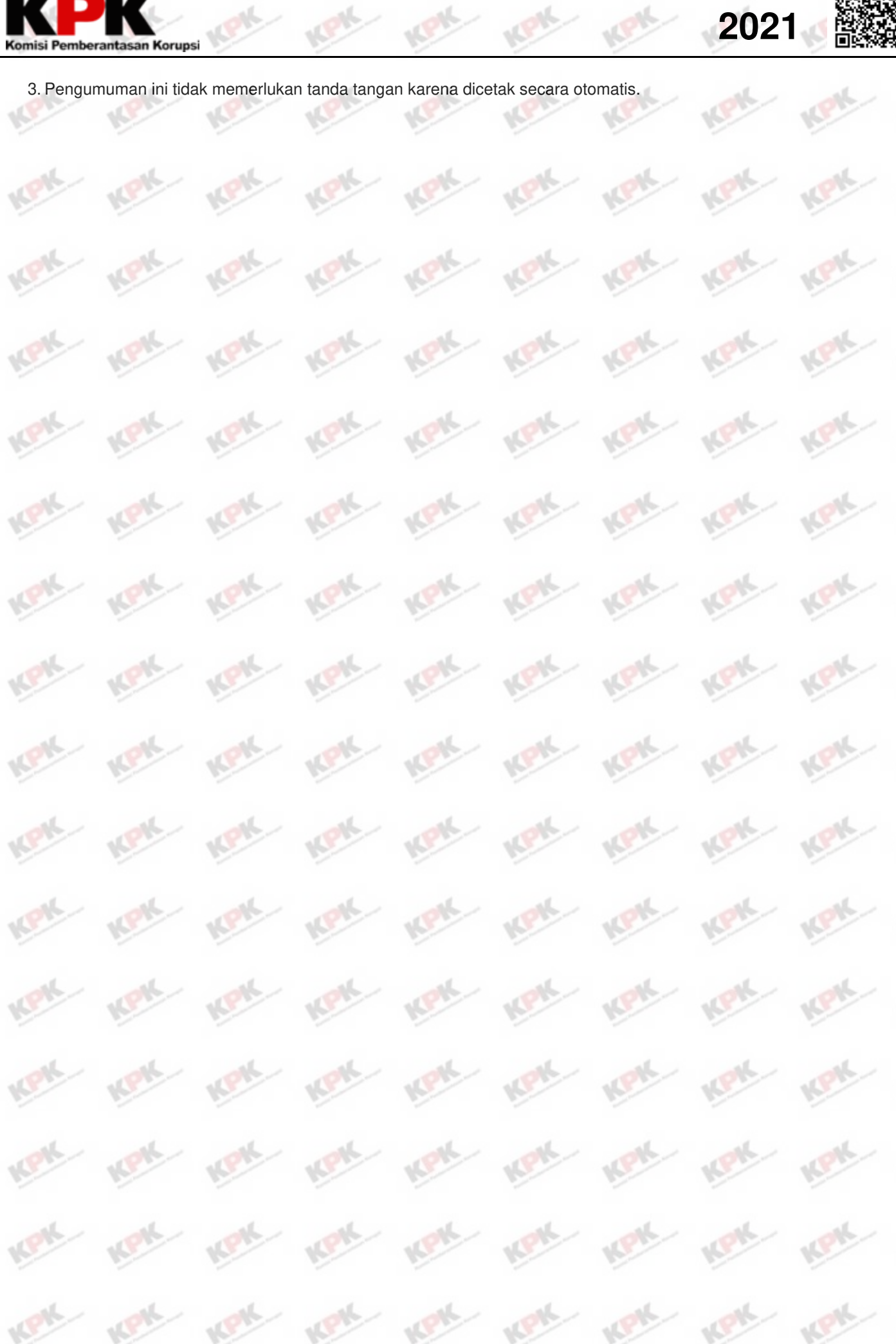
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.473.500.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I MADE DANA TENAYA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 770302

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 65.522.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/30 m2 di KOTA DENPASAR ,  
HASIL SENDIRI Rp. 65.522.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 270.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
258.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.995.223

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 353.517.223

**III. HUTANG** Rp. 569.944.755

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. -216.427.532

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I MADE DANA TENAYA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 770302

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 65.522.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/30 m2 di KOTA DENPASAR ,  
HASIL SENDIRI Rp. 65.522.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 270.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
258.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.995.223

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 353.517.223

**III. HUTANG** Rp. 569.944.755

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. -216.427.532

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I MADE SUTARJANA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 689638

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 622.800.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 122.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 134.000.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 15.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 73.448.701

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 845.248.701

**III. HUTANG** Rp. 398.741.923

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 446.506.778

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I MADE SUTARJANA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 689638

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 675.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 132.000.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 15.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 24.941.131

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 846.941.131

**III. HUTANG** Rp. 331.370.006

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 515.571.125

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I NYOMAN RATMAJA
2. Jabatan : KEPALA UPTD
3. NHK : 490041

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	115.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	----
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	715.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	715.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I NYOMAN RATMAJA  
2. Jabatan : KEPALA BIDANG  
3. NHK : 490041

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>600.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>115.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERTHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>715.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>715.000.000</b>

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDA AYU NYOMAN CANDRAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 674863

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 108.500.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 97.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 76.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 15.538.300

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.900.038.300

**III. HUTANG** Rp. 607.409.418

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.292.628.882

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI

**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDA AYU NYOMAN CANDRAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 674863

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 99.500.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 98.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.415.000.000

**III. HUTANG** Rp. 607.409.418

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.807.590.582

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.